

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Pada PT BNI Cabang Muaro Bungo

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan. Resi gudang sebagai salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Di Kabupaten Muaro Bungo, resi gudang sudah digunakan sebagai jaminan di Bank BNI Cabang Muaro Bungo.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di PT BNI Cabang Muaro Bungo serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank BNI selaku kreditur terkait jaminan berupa Resi Gudang yang nilainya menyusut saat terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kredit dan jaminan Resi gudang. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa resi gudang dapat digunakan sebagai jaminan utang di Bank BNI Kabupaten Muaro Bungo. Walaupun jaminan yang diutamakan adalah jaminan tanah, namun Bank BNI memberikan kesempatan kepada petani untuk menjaminkan produk yang ada di dalam gudang yang mereka miliki sebagai jaminan hutang untuk memperoleh fasilitas kredit di Bank BNI. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan resi gudang seperti tidak jelasnya criteria barang dalam gudang yang dapat menjadi objek jaminan. Hal ini karena belum adanya peraturan pelaksana dari undang-undang resi gudang. Upaya Hukum yang dilakukan Bank BNI dalam hal debitur wanprestasi antara lain adalah dengan pendekatan internal berupa restrukturisasi, reschedule dan peringatan. Eksekusi terhadap barang resi gudang dilakukan melalui lelang.

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat segera membuat peraturan pelaksana dari undang-undang resi gudang agar pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan resi gudang dapat dilaksanakan dengan baik di masa depan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Resi Gudang

ABSTRACT

Review Juridical Legal Protection For Creditors In Credit Agreement With Warranty Warehouse Receipt In BNI Branch Muaro Bungo

Warehouse receipt is a document proof of ownership of the goods stored in a warehouse, published by the warehouse manager and can become an instrument of trade. Warehouse receipts as a form of collateral is a way out of the limited capital of farmers and entrepreneurs in the field of agriculture unfreeze credit for the development of the business. In Muaro Bungo, receipt gudan been used as collateral in Bank BNI Muara Bungo.

The problems of this research is about how to guarantee credit agreement implementation with warehouse receipt in PT BNI Muara Bungo and to know the efforts made by PT Bank BNI as creditors related warehouse receipt collateral whose value is shrinking as a default by the debtor.

The results of this study explained that the warehouse receipts can be used as collateral in Bank BNI Muaro Bungo. Although the preferred guarantee is a guarantee of land, but BNI allows farmers to ensure a product that is in their warehouses as collateral to obtain credit facilities in BNI. There are many obstacles in the implementation of the credit agreement with the use of warehouse receipts as no clear criteria for the goods in the warehouse that can be the object of a guarantee. This is due to the lack of implementing regulations of the law of warehouse receipts. Legal efforts by the Bank BNI in case the debtor defaults, among others, is the internal pendekatan form of restructuring, rescheduling and warnings. Execution against goods warehouse receipt is done through auction.

This research is expected the government may soon make the implementing rules of the law of warehouse receipts for the implementation of the credit agreement to use the warehouse receipt can be performed well in the future

Key Word: Legal Protection, Credit Agreement, Warehouse Receipt